

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KARTU
IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL DI KABUPATEN TANGGERANG PROVINSI BANTEN**

Nira Chopipah

NPP. 30.0626

Asdaf Kabupaten Tangerang , Provinsi Banten

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : chopipahniral@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/ Background (GAP) : *The Child Identity Card service program is an activity carried out by the Tangerang Regency Population and Civil Registration Office in increasing the Issuance of MCH which still has a low level of ownership in the community so that it has not yet reached the national target. **The purpose** of this study is to analyze and describe the implementation of the service program in increasing the issuance of MCH in Tangerang Regency. **The research method** used is descriptive qualitative method with an inductive approach. In collecting data, researchers used interview, observation and documentation techniques. The theory used in this thesis is the implementation theory put forward by Van Horn. In this theory, implementation is measured through 6 (six) dimensions, namely basic measures and policy objectives, resources, inter-organizational communication and implementation activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political environment. **The results** of this study indicate that the implementation of service programs in increasing MCH issuance is good. **The Conclusion** there are several obstacles in the implementation of service programs to increase the issuance of MCH and obstacles from the community. Obstacles in implementing the service program in issuing KIA are the budget, the distance between sub-districts to service centers and unfavorable weather and infrastructure. The obstacles from the community are the lack of level of awareness and level of understanding. However, these obstacles can be overcome by the Department of Population and Civil Registration of Tangerang Regency through efforts so that the implementation of the service program to increase the issuance of KIA in Tangerang Regency runs well.*

Keywords: *Implementation, Service Program, Child Identity Card*

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) : Program pelayanan Kartu Identitas Anak merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam Meningkatkan Penerbitan KIA yang masih rendah tingkat kepemilikannya di masyarakat sehingga belum mencapai target nasional. **Tujuan** dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan program pelayanan dalam

meningkatkan penerbitan KIA di Kabupaten Tangerang. **Metode penelitian** yang digunakan adalah Metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Van Horn. Dalam teori ini, pelaksanaan diukur melalui 6 (enam) dimensi yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. **Hasil penelitian** ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelayanan dalam meningkatkan penerbitan KIA sudah baik. **Kesimpulan** terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pelayanan guna meningkatkan penerbitan KIA dan hambatan dari masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan program pelayanan dalam penerbitan KIA yakni anggaran, jarak antarkecamatan terhadap pusat pelayanan dan cuaca yang tidak mendukung serta sarana prasarana. Adapun hambatan dari masyarakat yakni kurangnya tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman. Namun hambatan tersebut dapat diatasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang melalui upaya-upaya sehingga pelaksanaan program pelayanan dalam meningkatkan penerbitan KIA di Kabupaten Tangerang berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Pelayanan, Kartu Identitas Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dari dibuatnya Kartu Identitas Anak adalah upaya pemerintah untuk memberikan hak konstitusional berupa identitas kepada seluruh penduduk Indonesia yang berlaku secara nasional dan sebagai upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia.¹ KIA tidak hanya sebagai identitas resmi anak tetapi juga sebagai “*entry point*” dalam pendataan anak dan pemberian perlindungan kepada anak yang melibatkan berbagai pihak sebagaimana dimaksud adalah sebagai monitoring tindakan rehabilitatif pasca tindakan kekerasan yang dialami oleh anak. Sejak Januari sampai November 2022 tercatat, ada 60 kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Korbannya sebagian besar adalah perempuan. Namun, di beberapa kasus ada juga laki-laki yang menjadi korban. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) mencatat, selama kurun waktu 2022 sebanyak 18.819 kasus, Diantaranya 3.041 adalah korban laki-laki dan 17.249 adalah korban perempuan.² Menurut Kepala DP3A Kabupaten Tangerang Asep Suherman, Untuk kasus pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual 60 kasus dengan rentang usia korban 10-18 tahun. Rata-rata kejahatan seksual pada anak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Seperti bapak kandung, ayah sambung, guru, tetangga, atau teman yang dikenal korban lewat media sosial. Faktor ekonomi dan pola asuh jadi salah satu penyebab

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak., 2016.

² burhan

Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA: Capaian 2022 Dan Resolusi 2023, Wujudkan Sinergi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” last modified 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4367/menteri-pppa-capaian-2022-dan-resolusi-2023-wujudkan-sinergi-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/wqqd/k513831.html#>.

terjadinya kasus kekerasan seksual ini.³ Melihat banyaknya laporan kasus yang dialami oleh anak-anak membuat negara harus memberikan perhatian khusus sebagai upaya dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kartu identitas anak yang nantinya akan difokuskan untuk memecahkan sebuah masalah akibat dari maraknya kejadian-kejadian yang dialami oleh anak yang tidak mendapatkan hak penuh di mata hukum.⁴ Berdasarkan data yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2020 yang berada di Kabupaten Tangerang diperoleh bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak Penduduk Kabupaten Tangerang adalah sebesar 15.91% dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak terbesar berada pada Kecamatan Tigaraksa yaitu sebesar 40.99% dan terkecil berada pada Kecamatan Gunung Kaler yaitu sebesar 1.52%.⁵ Hal ini tentunya diketahui bahwa kepemilikan KIA pada anak masih belum tersebar secara merata yang menyebabkan sulitnya orangtua untuk menghubungi pihak terkait seperti polisi atau komisi perlindungan anak jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Seperti yang terjadi di sepanjang Januari 2022 kemarin, 20 anak dibawah umur baik berjenis kelamin pria ataupun wanita di kabupaten tangerang menjadi korban pemerkosaan.⁶ Hal ini mungkin bisa diminimalisir jika orangtua atau wali memiliki kesadaran untuk mendaftarkan anaknya dalam pembuatan KIA, karena nantinya dalam pendaftaran pembuatan KIA, orangtua akan diberikan informasi baik berupa brosur dan konseling seputar hak-hak anak, informasi pencegahan pelecehan seksual pada anak, layanan konsultasi anak dan orangtua, dan nomor darurat yang bisa dihubungi untuk pengaduan informasi tindakan kekerasan pada anak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program pelayanan kartu identitas anak kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) . Sejak Januari sampai November 2022 tercatat, ada 60 kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Korbannya sebagian besar adalah perempuan. Namun, di beberapa kasus ada juga laki-laki yang menjadi korban. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) mencatat, selama kurun waktu 2022 sebanyak 18.819 kasus, Diantaranya 3.041 adalah korban laki-laki dan 17.249 adalah korban perempuan.⁷ Menurut Kepala DP3A Kabupaten Tangerang Asep Suherman, Untuk kasus pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual 60 kasus dengan rentang usia korban 10-18 tahun. Rata-rata kejahatan seksual pada anak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Seperti bapak kandung, ayah sambung, guru, tetangga, atau teman yang dikenal

³ Aznui Syamsul Ma'arif, "76 Orang Anak Di Tangerang Jadi Korban Kekerasan Seksual," last modified 2023, <https://banten.antaranews.com/berita/229553/sebanyak-76-orang-anak-di-tangerang-jadi-korban-kekerasan-seksual>.

⁴ Pramita Tristiawati, "20 Anak Di Kabupaten Tangerang Jadi Korban Pemerkosaan Sepanjang Januari 2022," last modified 2022, accessed November 8, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4883275/20-anak-di-kabupaten-tangerang-jadi-korban-pemerkosaan-sepanjang-januari-2022>.

⁵ Ibid.

⁶ Tristiawati, "20 Anak Di Kabupaten Tangerang Jadi Korban Pemerkosaan Sepanjang Januari 2022."

⁷ Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Menteri PPPA: Capaian 2022 Dan Resolusi 2023, Wujudkan Sinergi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," last modified 2023, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4367/menteri-pppa-capaian-2022-dan-resolusi-2023-wujudkan-sinergi-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/wqpqd/k513831.html#>.

korban lewat media sosial. Faktor ekonomi dan pola asuh jadi salah satu penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual ini

- 2) Melihat banyaknya laporan kasus yang dialami oleh anak-anak membuat negara harus memberikan perhatian khusus sebagai upaya dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kartu identitas anak yang nantinya akan difokuskan untuk memecahkan sebuah masalah akibat dari maraknya kejadian-kejadian yang dialami oleh anak yang tidak mendapatkan hak penuh di mata hukum.
- 3) Berdasarkan data yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Tahun 2020 yang berada di Kabupaten Tangerang diperoleh bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak Penduduk Kabupaten Tangerang adalah sebesar 15.91% dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak terbesar berada pada Kecamatan Tigaraksa yaitu sebesar 40.99% dan terkecil berada pada Kecamatan Gunung Kaler yaitu sebesar 1.52%.⁸ Hal ini tentunya diketahui bahwa kepemilikan KIA pada anak masih belum tersebar secara merata yang menyebabkan sulitnya orangtua untuk menghubungi pihak terkait seperti polisi atau komisi perlindungan anak jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Seperti yang terjadi di sepanjang Januari 2022 kemarin, 20 anak dibawah umur baik berjenis kelamin pria ataupun wanita di Kabupaten Tangerang menjadi korban pemerkosaan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Implementasi Program pelayanan kartu identitas anak. Penelitian pertama dari Risky Saputra dan Erwin Resmawan dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Pada penelitian ini ditemukan Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA telah diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dilihat dari standar pelayanan yang digunakan dalam pelaksanaannya khususnya KIA yang terdiri atas persyaratan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan (Risky Saputra & Erwin Resmawan, 2019). Penelitian kedua adalah penelitian dari Windiani Pratiwi dengan judul penelitian Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Permendagri No.2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program KIA Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan baik sebab masih kurangnya sosialisasi (Windiani Pratiwi, 2020). Penelitian ketiga dari Yusi Ristiani, Agus Nurulsyam Suparman, Asep Nurwanda dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (kia) di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian implementasi kebijakan kartu identitas anak sudah dilakukan dengan cukup baik hanya saja masyarakat sedikit acuh terhadap pembuatan Kartu Identitas Anak mungkin di anggap tidak terlalu penting oleh masyarakat sendiri (Yusi Ristiani, Agus Nurulsyam Suparman, Asep Nurwanda, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian pertama dan ketiga letak perbedaannya adalah pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang peneliti teliti sendiri terletak di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sehingga hasil penelitianpun tidak mungkin sama. Pada penelitian kedua yang menjadi pembeda dengan

⁸ Ibid.

peelitian yang peneliti lakukan adalah pada teori yang digunakan. Pada penelitian kedua menggunakan teori sementara peneliti saat ini menggunakan teori Edwards III.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian ini. Alasan utama penulis memilih metode kualitatif yakni karena penelitian ini bertujuan memahami situasi sosial, peristiwa atau masalah sosial, peran dan interaksi sosial dalam program pelayanan Kartu Identitas Anak. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 9 (sembilan) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Van Horn.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis Implementasi kebijakan program pelayanan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten menggunakan teori pelaksanaan yang dikemukakan oleh Van Horn adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

pelaksanaan program pelayanan KIA sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program nasional yang sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa pada tahun 2022 provinsi banten menargetkan sebanyak 600 ribu lebih warga untuk memiliki kartu identitas anak. Dari target sekitar 600 ribu lebih warga yang diwajibkan memiliki identitas itu berdasarkan data dari dirjen kependudukan kementerian dalam negeri tahun 2022. Dalam glosary di bidang administrasi negara, kebijakan publik mempunyai arti : (1) *The organizing framer work of purposes and rationales for government program s that deal with specified societal problems*, (2) *whatevers government chooser to do or not to do*, (3) *the complex programs enacted and implemented by governments*. (“ bahwa ; susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat, (2) apapun yang idpilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak, (3) masalah-masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan pemerintah”) (dalam islamy,2002:20) Tujuan kebijakan publik menurut Udoji (1981) adalah; mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹

3.2 Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Untuk Program KIA jemput bola pada *World of Wonders* dan Sekolahdi sekitar wilayah Kabupaten Tangerang, sumber daya manusia yangterlibat dalam program pelayanan KIA hanya ada 4 orang, yaitu 3 orang yang memiliki tugas untuk membantu penerbitan KIA

⁹Chief J O Udoji, *The African Public Servant as a Public Policy in Africa* (Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management, 1981).

di *World of Wonders*, sementara untuk penerbitan jempot bola pada tiap sekolah hanya ada 1 pegawai yang bertugas untuk ke sekolah-sekolah tersebut. Semua pihak-pihak yang terlibat memiliki tugas serta fungsi masing-masing yang membantu pemantauan serta memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk monitoring serta evaluasi.

b) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah sumber daya yang berkaitan dengan pengalokasian dana. Dalam mencapai tujuan kebijakan publik tidak akan berhasil ketika sumber daya manusia berkualitas tersedia, tetapi sumber daya finansial tidak tersedia. Sumber daya finansial di Disdukcapil sudah didukung oleh Pemerintah yang menyediakan anggaran untuk pelaksanaan program pelayanan KIA yang dianggarkan setiap tahunnya. Untuk penganggarannya di dilakukan berdasarkan rekapitulasi berapa banyak masyarakat yang wajib memiliki KIA dan berapa banyak alat yang dibutuhkan untuk menerbitkan KIA tersebut.

3.3 Karakteristik Dukcapil

Agen pelaksana dalam program pelayanan KIA di Disdukcapil meliputi pegawai Disdukcapil dan pihak yang bekerjasama dengan Disdukcapil untuk menerbitkan KIA seperti Taman Hiburan anak atausekolah baik SD, SMP, maupun SMA. Sehubungan dengan banyaknya agen pelaksana dalam program pelayanan KIA maka harus dapat dikoordinasikan dengan baik supaya tidak ada perbedaan visi dalam pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan penerbitan KIA tim pelaksana memiliki karakter jujur, berkomitmen, dan dapat berdemokrasi dengan baik. Karakter ini adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh para implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur yang akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang akan ditemui dalam program/kebijakan yang sedng dilaksanakan. Seperti yang dikatakan Wahab (2008:4) menjelaskan karakteristik dari organisasi diantaranya adalah sebuah entitas sosial, bertujuan atau diarahkan oleh tujuan, memiliki sistem kegiatan terstruktur yang di sengaja, dan dengan batas batas yang jelas.¹⁰

3.4 Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan program pelayanan KIA di Dukcapil adalah penyampaian informasi dari penentu kebijakan kepada kepala ruang, bidan kordinator dan bidan pelaksana. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di pendaftaran penduduk khususnya pada bidang KIA biasanya akan didiskusikan langsung dengan mengadakan rapat sesuai dengan penanggungjawab pelaksana program. Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan dengan satu upaya tetapi banyak upaya lainnya, contohnya seperti membagikan brosur yang isinya bukan hanya dapat dilihat pada brosur tetapi juga pada laman resmi *youtube* Disdukcapil Kab. Tangerang. Sejalan dengan Goldhaber (1986) bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah.¹¹

¹⁰ Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2008).

¹¹ G M Goldhaber, "Organizational Communications, 4-Th Edition, Wm. C" (Brown Publishers, Dubuque, Iowa, 1986).

3.5 Kecenderungan / Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang sudah memiliki KIA tentang pelayanan program KIA yaitu Ibu Nilasari mengatakan: “Saat pelayanan jemput bola saya dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhan saya, orangnya ramah. Disini pelayanannya juga cepat dan ga perlu antri-antri lagi. Kalau saya tanya, juga dijelaskan dengan bahasa yang saya pahami.” Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kab. Tangerang memiliki banyak upaya dalam mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap penerbitan KIA. Dengan memberikan pelayanan yang maksimal di lakukan oleh disdukcapil demi mencapai target meratanya kepemilikan KIA di seluruh daerah Kab. Tangerang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Edwards III dalam Indiahono (2009:48) sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public.

3.6 Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Unsur politik dalam pelaksanaan program pelayanan KIA adalah adanya dukungan dari pemerintah khususnya taman hiburan anak *World of Wonders*, kecamatan, kelurahan, RT RW, maupun tokoh masyarakat yang berperan penting dalam program tersebut. Sependapat dengan Dalyono (2005) dalam Basrowi dan Juariyah (2010) bahwa kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang memengaruhi kita dan kondisi ekonomi menurut Sumardi dan Evers (2001) dalam Basrowi dan Juariyah (2010) bahwa keadaan ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat.¹²

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah khususnya instansi penyelenggara guna mengatasi masalah tersebut. Melalui Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan inovasi pelayanan agar mempercepat target pencapaian dan juga mempermudah akses dalam pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan salah satunya melalui kegiatan jemput bola yang bekerjasama dengan World of Wonders Taman bermain dan Hiburan anak dalam melaksanakan pembuatan KIA. Hal ini sejalan dengan peraturan Bupati Tangerang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dan di tahun ini penerbitan KIA melebihi target yaitu sebesar 31.18% dari target sebesar 30% yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 sehingga presentase capaian kinerjanya adalah 103.93%. walaupun cakupan kepemilikan KIA sudah melebihi target namun cakupan kepemilikan KIA masih jauh dari target yang telah ada. Hal ini menandakan bahwa penerbitan KIA ini dapat dikatakan mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam implementasi kebijakan program pelayanan kartu identitas anak terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah : Tingkat pemahaman Tidak semua masyarakat di Kabupaten tangerang terutama dibeberapa pelosok desa/kelurahan setiap kecamatan mengetahui KIA, hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan tingkat pendidikan yang rendah

¹² S Basrowi & Juariyah, “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7 (1), 58-81 (2010).

Selain itu Masih ditemukan masyarakat yang menganggap bahwa KIA tidak perlu diterbitkan untuk anak yang masih kecil karena pada usia 17 tahun baru dibuatkan Kartu Tanda Penduduk padahal tujuan dan fungsinya sama.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Pelayanan KIA di Kabupaten Tangerang berjalan dengan baik dimana hal ini terlihat dari:

1. Tujuan dan standar kebijakan

Berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA bahwa penerbitan KIA adalah program nasional yang bertujuan untuk memeberikan hak yang sama kepada anak di mata hukum.

2. Sumber daya

Memiliki sumber daya manusia, dengan adanya pembagian tugas yang tiap masing personil memilik tanggung jawab pada tiap program yang terlaksana di dalam KIA. Adanya anggaran sebagai sumber daya finansial untuk mendukung terlaksananya program pelayanan KIA berjalan dengan baik dan tidak terkendala.

3. Komunikasi antar organisasi

Memiliki cara penyampaian yang mudah di mengerti oleh masyarakat, pihak Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan betul, pentingnya KIA untuk kemudahan anak sebagai identitas resmi dirinya.

4. Karakteristik badan pelaksana

Kepemimpinan yang tegas dan tidak otoriter, diberikan oleh kepala dinas sebagai contoh untuk pegawai yang lain dalam menjalankan tugasnya dala melayani masyarakat

5. Kecenderungan sikap para pelaksana

Pihak Disdukcapil melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya masing masing dan mengutamakan aspirasi masyarakat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat demi keberlangsungan program pelayanan KIA agar berjalan dengan lancar.

6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Banyaknya masyarakat di lingkungan desa yang tidak mengetahui bahwa penerbitan KIA tidak di pungut biaya, membuat masyarakatlainnya menjadi enggan untuk membuat KIA. Tetapi hal ini telah diatasi dengan pihak dukcapil memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung mengenai pembuatan KIA melalui sekolah-sekolah bahwa pembuatan KIA tidak di pungut biaya samasekali.

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) : peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Pelayanan Kartu Identitas Anak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Juariyah, S. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7 (1), 58 81 (2010).
- Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Capaian 2022 Dan Resolusi 2023, Wujudkan Sinergi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." Last modified 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4367/menteri-pppa-capaian-2022-dan-resolusi-2023-wujudkan-sinergi-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/wqpqd/k513831.html#>.
- Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Goldhaber, G M. "Organizational Communications, 4-Th Edition, Wm. C." Brown Publishers, Dubuque, Iowa, 1986.
- Ma'arif, Aznui Syamsul. "76 Orang Anak Di Tangerang Jadi Korban Kekerasan Seksual." Last modified 2023. <https://banten.antarane.ws.com/berita/229553/sebanyak-76-orang-anak-di-tangerang-jadi-korban-kekerasan-seksual>.
- Ristiani, Yusi, Agus Nurulsyam Suparman, and Asep Nurwanda. "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran." FISIP Universitas Galuh, 2022.
- Saputra, Risky, Erwin Resmawan, and Burhanudin. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser)." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 2 (2019).
- Tristiawati, Pramita. "20 Anak Di Kabupaten Tangerang Jadi Korban Pemerkosaan Sepanjang Januari 2022." Last modified 2022. Accessed November 8, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4883275/20-anak-di-kabupaten-tangerang-jadi-korban-pemerkosaan-sepanjang-januari-2022>.
- Udoji, Chief J O. *The African Public Servant as a Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management, 1981.

Wahab, Abdul Aziz. *Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Windiani, pratiwi. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten labuhanBatu Selatan.” FISIP, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak., 2016.

